



Oleh: ANDREA ARDI ANANDA<sup>1</sup>  
Email: [andreselong@gmail.com](mailto:andreselong@gmail.com)

# Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis *Community Engagement* di Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB

## Abstrak

Kemajuan suatu bangsa dilihat dari bagaimana kondisi Sumber Daya Manusiannya. Salah satu yang menjadi indikator pada umumnya adalah pendidikan. Tingkat Pendidikan masyarakat terutama di desa dapat dikatakan belum merata jika melihat ketersediaan sarana pendidikan yang ada. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan setiap desa mampu menyediakan, mengelola dan mengembangkan sarana perpustakaan yang ada di desa sebagai wujud pembangunan bangsa. Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan sepanjang hayat dirasa perlu menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak hanya dari segi pengetahuan dan keterampilannya namun juga berpengaruh pada peningkatan taraf ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu sekiranya dilakukan inovasi dan strategi pengembangan yang mampu menjadikan perpustakaan khususnya di desa sebagai pusat kegiatan dan belajar masyarakat melalui prinsip *community engagement* (pelibatan masyarakat) seperti yang sudah dilakukan di beberapa Perpustakaan Desa di Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB.

**Kata Kunci:** Perpustakaan Desa, *Community Engagement*, Pelibatan Masyarakat, Lombok Timur

## Pendahuluan

Di negara-negara maju, perpustakaan telah menjadi bagian dari gaya hidup (*lifestyle*) masyarakatnya, dan menjadi sarana yang strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), kebutuhan akan perpustakaan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tidak aneh jika kita lihat banyak orang Eropa menghabiskan waktunya untuk membaca di tempat-tempat umum layaknya halte bus, di dalam kereta, bahkan saat berjemur di pinggir pantai sekalipun. Wajar jika tingkat kemajuan di negara-negara Eropa begitu pesatnya. Hal ini tentu patut untuk ditiru oleh Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat populasi penduduknya termasuk dalam 5 besar di dunia, mengingat SDM merupakan elemen vital dalam menggerakkan pembangunan di suatu bangsa.

Keberadaan sarana perpustakaan terutama perpustakaan desa memang masih sangat terbatas bahkan cenderung memprihatinkan kondisinya. Garda utama dan pembangunan awal dari negara bermula dari desa. Pembangunan desa sangat menentukan untuk keberlanjutan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Keberhasilan pembangunan di desa tentu akan berpengaruh besar bagi penentuan kebijakan di pusat. Hal ini tentu tak lepas dari kualitas SDM yang ada di desa serta bagaimana tingkat pendidikan masyarakatnya sebagai faktor utama kemajuan suatu desa. Sarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan tentu sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat desa.

<sup>1</sup> Pemenang Kedua Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2015 dan Pustakawan Pertama di Kantor Perpustakaan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Dengan adanya otonomi daerah tentu menjadi kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah untuk mengelola Perpustakaan Desanya. Saat ini di NTB hampir sebagian besar desa sudah memiliki perpustakaan namun tidak sedikit pula yang belum memilikinya, atau sudah punya sarana perpustakaan namun belum berjalan secara efektif. Khususnya di Lombok Timur sudah terbentuk 189 Perpustakaan Desa dari total jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 252 berdasarkan data terakhir tahun 2014. Perpustakaan Desa dianggap hanya pelengkap saja, rak-rak buku diletakkan begitu saja layaknya hiasan ruangan tanpa mau disentuh. Oleh karena itu perlu upaya dan usaha dari semua lapisan masyarakat sehingga perpustakaan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah dan populasi penduduknya terbesar di Provinsi NTB tentu menjadi poros penggerak pembangunan, sehingga tentu pengembangan sarana pendidikan seperti perpustakaan desa menjadi salah satu hal yang setidaknya patut mendapat perhatian agar pembangunan dapat terus berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga harus ada komitmen juga dari perpustakaan desa terutama dari pihak Kepala Desa untuk mendukung perkembangan perpustakaan desa melalui kebijakan-kebijakan yang diambil maupun penganggaran. Dengan demikian strategi dan inovasi apa pun dapat berjalan dan terlaksana secara berkesinambungan.

### Definisi Perpustakaan

Berdasarkan paradigma lama, khususnya di Indonesia, perpustakaan sering diartikan sebagai sebuah gedung atau ruangan tempat menyimpan buku-buku. Gedung perpustakaan pada umumnya menggunakan gedung tua, pengap, sepi bahkan terkesan angker di mana pengunjung dilayani oleh pegawai yang kurang bergairah dan tidak ramah terhadap pengguna. Namun seiring perkembangan ilmu perpustakaan lambat laun paradigma lama tergeser oleh paradigma baru, di mana perpustakaan adalah sesuatu yang hidup, dinamis, serta dengan inovasi layanan yang lebih atraktif, interaktif, edukatif dan rekreatif bagi pengunjungnya (Hermawan, 2006: 7).

Banyak sekali definisi dari perpustakaan yang dikemukakan para ahli. Berikut adalah beberapa definisi umum dari perpustakaan;

1) Menurut Sulistyio Basuki (1991:3)

Perpustakaan ialah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu

untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual.

2) Menurut SK Menpan Nomor 132 Tahun 2003

Perpustakaan adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya terdiri dari 1000 judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan dan dikelola menurut sistem tertentu.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi para pemustaka.

### Landasan Hukum

Landasan hukum tentang perpustakaan desa telah mengalami perubahan dan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Landasan dimaksud antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan Secara Resmi Urusan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
- 6) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Pembentukan perpustakaan desa itu perlu didasarkan pada keputusan pejabat yang berwenang seperti Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh eksekutif bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tujuannya untuk memenuhi asas formal dan legal di samping menjadi kekuatan moral dari seluruh warga masyarakat.

Menurut catatan sejarah, perpustakaan desa pada dasarnya adalah Perpustakaan Rakyat. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1953, bahwa Lembaga Perpustakaan sebagai urusan Pemerintah Pusat yang telah resmi diserahkan kepada Daerah. Pada hakikatnya Perpustakaan Desa termasuk dalam jenis Perpustakaan Umum. Di mana Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar

belakang, status sosial, agama, suku, pendidikan, dan sebagainya. Konsep dasarnya adalah didirikan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan didanai dengan dana masyarakat. Terkait Perpustakaan Umum Desa, Sulisty Basuki (1991:48) menyatakan bahwa perpustakaan jenis ini lazim juga disebut perpustakaan desa, merupakan perpustakaan yang terdapat di desa dan dikelola oleh swadaya masyarakat desa. Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.

Pada Pasal 16 butir (e) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 secara jelas tercantum penyelenggaraan perpustakaan desa dan pada Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan juga menjabarkan bahwa Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Eksistensi perpustakaan desa sangatlah penting, sementara perkembangannya belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh karena keterbatasan dan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya menunjang. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan desa bertujuan untuk melayani masyarakat. Sebuah upaya menyediakan fasilitas membaca, belajar yang memadai yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, wilayah dan kebutuhan masyarakat. Setiap desa hendaknya membentuk perpustakaan sesuai dengan sifat yang khas, karakteristik, dan keunikan tersendiri sesuai khazanah di daerah masing-masing. Menurut Sutarno (2008: 27) tujuan yang lebih rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Menunjang program wajib belajar dan program pendidikan keterampilan masyarakat lainnya
- 2) Menyediakan wahana mencerdaskan kehidupan masyarakat desa dan menumbuhkan daya kreasi, prakarsa dan swakarsa masyarakat melalui peningkatan gemar membaca dan semangat belajar masyarakat
- 3) Memberi semangat belajar dan hiburan yang sehat dalam memanfaatkan hal-hal yang bersifat membangun dalam waktu senggang
- 4) Menyediakan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat dalam berbagai bidang
- 5) Menyediakan kebutuhan sarana edukasi, rekreasi, penerangan, informasi, dan penelitian bagi warga desa.

#### **Pelibatan Masyarakat (*Community Engagement*)**

Peran masyarakat dalam memajukan pembangunan sudah pasti sangatlah signifikan dan tak bisa dipungkiri menjadi roda penggerak dalam kemajuan suatu bangsa. Partisipasi masyarakat harus dioptimalkan agar tujuan yang direncanakan tercapai, tak terkecuali di perpustakaan

desa. Pelibatan masyarakat diartikan sebagai kegiatan di perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan informasi yang luas (buku, internet, pelatihan) dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Menilik kondisi dari Perpustakaan Desa di Lombok Timur saat ini yang cukup memprihatinkan maka sudah saatnya dilakukan pembenahan-pembenahan yang mampu menghidupkan kembali perpustakaan desa yang sebelumnya mati suri. Menurut Sutarno (2008: 123) permasalahan di perpustakaan desa sebagai berikut:

- 1) Jumlah perpustakaan desa belum merata di seluruh wilayah Indonesia, bahkan baru sebagian saja desa-desa yang telah membentuk perpustakaan. Banyak kendala yang ditemukan di lapangan baik manajerial maupun teknis. Kondisi itu ditambah dengan lemahnya pemahaman dan dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat.
- 2) Pembinaan kegemaran dan budaya membaca serta belajar di desa masih terkendala oleh banyak unsur yang tidak mudah diatasi. Kendala itu misalnya, budaya tutur, budaya lisan dan budaya bercerita yang masih dominan.
- 3) Perpustakaan desa yang dapat berfungsi dengan baik, paling tidak dapat dijadikan sarana belajar masyarakat, terutama anak-anak, para remaja dan pemuda.
- 4) Keberadaan perpustakaan desa di kantor desa/lurah mempunyai nilai plus-minusnya. Nilai plus, misalnya perpustakaan desa yang berada di kantor kepala desa adalah tempat yang strategis, maka masyarakat dengan berkunjung sambil menyelesaikan urusan dengan perangkat desa seperti mengurus KTP, pajak dan sebagainya. Nilai minusnya, misalnya kantor kepala desa terkesan angker, birokratis dan sangat formal sehingga masyarakat menjadi sungkan, malu atau malas ke perpustakaan desa.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka dirasa perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan Perpustakaan Desa di Kabupaten Lombok Timur. Pelibatan masyarakat bisa menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan perpustakaan desa. Masyarakat diajak untuk mengubah *mindset* mereka bahwa perpustakaan tidak hanya tempat membaca dan meminjam buku saja tetapi juga sebagai pusat kegiatan dan belajar masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada beberapa faktor pendukung dalam keberhasilan *community engagement* (pelibatan masyarakat) ini yaitu ketersediaan sarana komputer, internet, dan dukungan *stakeholders* terkait. Adapun langkah-langkah dalam melakukan pelibatan masyarakat di perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1: mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat
2. Langkah 2: menentukan jenis kegiatan pelibatan masyarakat yang memanfaatkan komputer dan internet
3. Langkah 3: menentukan sasaran kegiatan (anak-anak, kelompok remaja, wanita dan wirausaha mikro)
4. Langkah 4: menyusun rencana kegiatan

Kemajuan zaman ditandai dengan era komputer atau digitalisasi, di mana hampir semua aspek kehidupan kita sudah dapat diselesaikan secara modern dan berbasis komputer. Walaupun berada di desa namun keberadaan perangkat komputer ini sangat penting dalam membantu menyelesaikan pekerjaan di perpustakaan tapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Komputer yang terkoneksi dengan internet tentu akan menjadi nilai tambah dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Saat ini sudah dimulai program melek internet di desa. Baik dari pemerintah pusat hingga di daerah berlomba-lomba menyusun program yang menasar pada pemanfaatan internet di desa. Ambil contoh dengan program PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Perpustakaan Desa Pesanggrahan di Lombok Timur telah memanfaatkan sarana tersebut untuk mengadakan pelatihan komputer dasar bagi ibu-ibu kader PKK dan Posyandu. Dengan adanya sarana komputer yang terkoneksi dengan internet tentu bisa menjadi modal awal bagi perpustakaan desa melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar tergantung pada kuantitas dari sarana komputer yang tersedia. Keberadaan komputer dan internet di perpustakaan desa bukan dalam rangka menggeser peran buku, namun lebih kepada pelengkap dari informasi yang didapatkan dari buku sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkretnya seperti di Perpustakaan Desa Aikmel Lombok Timur, ketika seorang mantan TKW yang ingin membuka usaha sendiri mendapat informasi tentang Perpustakaan Desa yang dilengkapi komputer dan internet. Beliau langsung datang dan memanfaatkan sarana tersebut untuk memasarkan hasil kerajinan tangannya melalui jejaring sosial berupa tas dan dompet berbahan dasar kain perca bekas dan itu semua dilakukan tanpa biaya alias gratis.

Kemudian peran *stakeholder* atau pihak terkait dalam pengembangan Perpustakaan Desa di Lombok Timur tentu tidak dapat dikesampingkan. Adapun pihak-pihak terkait yang dapat membantu pengembangan

Perpustakaan Desa di Lombok Timur antara lain:

1) Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Tokoh pemuka masyarakat yang terdiri atas beberapa unsur seperti pemimpin agama, pengusaha, cendekiawan dan sebagainya. Keterlibatan tokoh masyarakat merupakan salah satu kekuatan yang substansial karena dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Tokoh masyarakat adalah sosok atau figur yang menonjol, terdepan, dan berkualitas dalam berbagai aspeknya. Oleh karena itu seharusnya dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Kepala Desa tentu menjadi sosok yang berperan dalam menggerakkan elemen masyarakat desa. Pada lingkungan masyarakat desa tertentu, peran tokoh masyarakat ini menjadi sentral karena petuah atau perintah pemuka adat/tokoh masyarakat yang dituakan dianggap sebagai peraturan atau kebijakan yang sifatnya harus dilakukan sehingga sangat penting untuk meminta tokoh masyarakat untuk berperan dalam membangun perpustakaan desa. Khususnya di Lombok Timur peran para Tuan Guru menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan pendekatan kepada Beliau mengenai sosialisasi perpustakaan saat adakan tausyiah atau pengajian.

2) Pemuda, Remaja, Relawan (Karang Taruna)

Pada dasarnya pembentukan perpustakaan desa, terutama diperuntukkan bagi kaum muda, remaja dan anak-anak serta mereka yang berusia produktif. Oleh karena itu mereka diharapkan bersedia dan tergugah untuk menjadi bagian dari pemangku kepentingan demi kemajuan perpustakaan. Salah satu cara melibatkan kelompok pemuda adalah dengan melibatkan langsung untuk membentuk, menyelenggarakan dan membina perpustakaan desa. Mereka dikelompokkan dalam relawan yang dengan senang hati mau peduli membantu perpustakaan desa. Di 5 Perpustakaan Desa Percontohan di Lombok Timur, relawan dari karang taruna sangat berperan aktif. Seperti di Perpustakaan Desa Kotaraja dengan Karang Taruna Bajang Wanen saling bekerja sama dengan mengadakan sosialisasi kepada para pemuda desa dan menjadi inisiator di setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat luas.

3) Instansi Terkait

Instansi terkait antara lain lembaga-lembaga pemerintahan baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi. Selain itu pula dapat melibatkan pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam memajukan perpustakaan desa. Pihak perpustakaan desa haruslah pintar-pintar mencari mitra untuk dapat berkegiatan yang melibatkan masyarakat luas tentu dengan

memegang prinsip simbiosis mutualisme. Kemudian perlu adanya advokasi dari perpustakaan desa kepada pihak pemerintah desa, kabupaten hingga provinsi jika perlu untuk mendapatkan dukungan baik dari segi penganggaran (*budget*) maupun kebijakan (*policy*) yang arahnya tentu untuk perkembangan perpustakaan desa. Misal kemitraan yang sudah terjalin dengan Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) dalam hal bantuan sarana Teknologi Informasi di 5 Perpustakaan Desa Percontohan di Lombok Timur, Perpustakaan Desa Aikmel Lombok Timur mengadakan sosialisasi usaha mikro dengan menggandeng PLUT UMKM Provinsi NTB, Perpustakaan Desa Sakra yang bekerjasama dengan dealer motor untuk mengadakan lomba memasak antar kader desa dan di Perpustakaan Desa Sepit yang bekerjasama dengan TK/PAUD di wilayah Desa Sepit untuk membuat jadwal kunjungan dan senam bersama seminggu sekali di Perpustakaan Desa.

Dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis *community engagement* ini pihak perpustakaan desa harus mampu menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Misal mengadakan lomba mewarnai tingkat TK/PAUD, pelatihan komputer dan internet dasar, pelatihan keterampilan anyaman/pengolahan limbah, penyuluhan kesehatan wanita dan masih banyak lagi. Semua dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya di perpustakaan seperti buku, majalah, surat kabar bahkan sarana internet. Pada dasarnya perpustakaan desa harus mampu berinovasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik minat kunjung dan partisipasi banyak masyarakat, dengan demikian lambat laun paradigma masyarakat akan berubah yang dulunya menganggap perpustakaan itu membosankan menjadi perpustakaan sebagai primadona dengan berbagai kegiatan menarik.

### Perpustakaan Desa di Lombok Timur

Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/127/ARPUSDOK/2010 tentang Pembentukan Perpustakaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lombok Timur menjadi tonggak pengembangan Perpustakaan Desa di Lombok Timur yang mana pengelolaannya berpedoman juga pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Lombok Timur. Dari segi penganggaran sebenarnya sudah diterbitkan Surat Edaran Bupati Lombok Timur Nomor: 180/18/KUM/2011 tentang pengembangan Perpustakaan Desa dapat dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dalam APBDes. Seperti yang sudah di uraikan sebelumnya bahwa di Kabupaten Lombok Timur terdapat

252 Desa/Kelurahan yang mana sudah ada 189 Desa yang sudah tersedia perpustakaan dan sisanya yaitu 63 Desa lagi sedang dalam tahap pengusulan untuk menerima bantuan pengembangan Perpustakaan Desa. Bantuan koleksi buku-buku bacaan dan sarana rak ini bersumber dari anggaran Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB bekerja sama dengan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Lombok Timur.

Pada umumnya kondisi Perpustakaan Desa di Lombok Timur tidak jauh berbeda dengan Kabupaten/Kota lain di NTB. Masih hanya berupa koleksi buku-buku yang diletakkan di rak dan belum dikelola secara optimal dikarenakan belum ada petugas khusus yang menangani perpustakaan. Sehingga layanan perpustakaan masih dapat dikatakan jalan di tempat. Melihat kondisi yang memprihatinkan ini tentu menjadi perhatian dari pihak terkait seperti Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Lombok Timur. Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada akhir tahun 2015 mendatang tentu persaingan dalam pembangunan akan semakin ketat sehingga bagi individu yang belum memiliki kompetensi memadai tentu akan tersisih dari kesempatan berkarya dan mengembangkan potensi diri.

Mengingat semakin dekatnya era MEA, kualitas dari SDM di Lombok Timur khususnya harus mulai ditingkatkan agar tidak tertinggal dengan Kabupaten/Kota lainnya bahkan dengan negara-negara tetangga. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Timur bisa dikatakan belum menggembirakan jika ditilik dari data survey beberapa tahun terakhir. Dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur belum masuk dalam jajaran 4 besar sekalipun. Hal ini tentu sungguh miris mengingat populasi penduduk Kabupaten Lombok Timur merupakan yang terbesar di Pulau Lombok. Belum semua lapisan masyarakat merasakan pendidikan dikarenakan tingkat kesejahteraan yang masih belum merata terutama di daerah-daerah terpencil di Lombok Timur. Infrastruktur yang masih minim ke daerah terpencil menjadikan akses akan informasi dan pengetahuan menjadi terhambat. Belum lagi karakter masyarakat di beberapa daerah terpencil yang belum memandang pendidikan sebagai sesuatu yang utama untuk anak-anaknya. Daripada pergi berangkat ke sekolah lebih baik mereka pergi ke kebun atau ladang untuk bercocok tanam demi kelangsungan hidup.

Keberadaan perpustakaan di desa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah pun terkesan sebagai pelengkap saja tanpa memandang bahwa koleksi perpustakaan tersebut harus diberdayakan agar tepat

guna. Banyak Perpustakaan Desa yang letaknya berada di pojok atau malah berada di belakang kantor desa yang notabene sulit untuk diakses serta terkesan tidak menarik sehingga masyarakat pun enggan untuk sekedar memilih-milih buku di Perpustakaan Desa. Apalagi rata-rata Perpustakaan Desa di Lombok Timur belum memiliki tenaga pengelola khusus sehingga menambah pelik permasalahan yang ada di Perpustakaan Desa.

Secara ideal pada dasarnya semua Perpustakaan Desa di Kabupaten Lombok Timur telah memiliki koleksi minimal 2.500 eksemplar dengan variasi judul dan subjek yang beragam untuk semua kalangan tanpa memandang suku, agama, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Selain itu setiap Perpustakaan Desa sudah disiapkan minimal 1 orang tenaga terampil khusus untuk mengelola perpustakaan tentu dengan komitmen dari Kepala Desa untuk mendukung keberadaan dan peran dari Perpustakaan Desa melalui kebijakan dan penganggaran yang memadai. Masalah klise seperti pendanaan yang belum menyentuh perpustakaan sering dijumpai hampir di sebagian besar desa di Lombok Timur walaupun sudah ada Surat Edaran Bupati terkait Alokasi Dana Desa untuk pengembangan Perpustakaan Desa namun belum diterapkan secara menyeluruh. Untuk itu perlu ada strategi baru untuk meningkatkan peran Perpustakaan Desa walaupun dengan segala keterbatasan.

Khususnya di Lombok Timur sejak 2014 telah ditunjuk 5 Perpustakaan Desa sebagai *pilot project* (percontohan) untuk pengembangan Perpustakaan Desa yang berbasis pelibatan masyarakat dengan condong pemanfaatan teknologi informasi (komputer dan internet) untuk dimanfaatkan masyarakat tidak hanya untuk sekedar menambah wawasan dan pengetahuan tetapi juga media untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya wirausaha muda/mikro. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di 5 Perpustakaan Desa Percontohan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perpustakaan Desa Sakra
  - Pelatihan komputer dasar bagi kadus
  - Pelatihan komputer dan internet bagi kader PKK dan posyandu
  - Sosialisasi perpuseru di tingkat desa Sakra
  - Pelatihan pembuatan kerajinan dari limbah non organik
  - Lomba memasak bagi komunitas perempuan
  - Gebyar musik bagi komunitas remaja
2. Perpustakaan Desa Aikmel
  - Pelatihan komputer bagi masyarakat desa aikmel
  - Lomba mewarnai tingkat PAUD
  - Lomba membaca puisi bagi pelajar tingkat SD

- Kegiatan pembuatan nugget dan jaja tujak
  - Workshop pengembangan UKM
  - Pelatihan pembuatan film dokumenter
3. Perpustakaan Desa Kotaraja
    - Lomba mewarnai tingkat TK/PAUD
    - Lomba membaca puisi tingkat SD/MI
    - Pelatihan komputer dan internet bagi kader PKK/posyandu
    - Sosialisasi perpuseru bagi masyarakat desa Kotaraja
    - Workshop keterampilan mengolah kain perca
    - Sosialisasi perpustakaan desa bagi karang taruna desa
  4. Perpustakaan Desa Sepit
    - Lomba mewarnai tingkat PAUD
    - Pelatihan komputer dasar bagi kadus
    - Pelatihan komputer dasar bagi kader PKK/posyandu
    - Pelatihan pengolahan limbah plastik
    - Lokakarya pengelolaan perpustakaan sekolah berbasis IT
  5. Perpustakaan Desa Pesanggrahan
    - Pelatihan komputer dasar bagi kader PKK/posyandu
    - Pelatihan pembuatan anyaman ketak
    - Lomba mewarnai tingkat PAUD
    - Pelatihan komputer dan internet bagi aparat desa/kadus

Adanya berbagai kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat di Desa ini tentu akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung kepada Perpustakaan Desa. Dari 5 Perpustakaan Desa Percontohan di Lombok Timur ini sudah menunjukkan tren positif dalam jumlah kunjungan masyarakat, pemanfaatan perpustakaan tidak hanya untuk meminjam buku tapi juga tempat berdiskusi, melakukan pelatihan keterampilan dan menjadi media peningkatan pendapatan melalui sarana internet yang disediakan secara gratis.

#### **Manfaat Pelibatan Masyarakat**

Banyak manfaat atau *impact* (dampak) yang sudah dirasakan oleh Perpustakaan Desa maupun masyarakat sebagai pemustakanya. Hal yang paling signifikan adalah bagaimana meningkatnya jumlah kunjungan di tiap Perpustakaan Desa Percontohan tersebut. Paling tidak dalam sehari kunjungan masyarakat mencapai 200 orang per harinya. Masyarakat semakin berkeinginan datang ke perpustakaan untuk merasakan sendiri seperti apa layanan perpustakaan yang mampu memenuhi kebutuhan informasi mereka.

Kemudian bagaimana meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui usaha mandiri yang digeluti setelah mendapatkan informasi dan pengetahuan dari Perpustakaan seperti di Perpustakaan Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Seorang warganya yang mantan TKW sebelumnya sudah membuat kerajinan tangan dari kain perca namun masih kesulitan untuk pemasaran produk karena minimnya modal dan tentu dengan pendapatan yang tidak seberapa. Setelah salah seorang staf Perpustakaan Desa Aikmel menginformasikan tentang adanya sarana internet di Perpustakaan Desa, beliau antusias untuk mau belajar memanfaatkan sarana internet disana. Dengan internet yang ada di Perpustakaan Desa beliau mampu meningkatkan penghasilan hingga dua kali lipat yang sebelumnya dikisaran 500.000-800.000 saat ini mampu meningkat hingga 1.000.000-1.500.000 keuntungan bersihnya dalam sebulan. Di internet beliau bisa memasarkan produk kerajinannya secara gratis melalui media sosial seperti *facebook* ataupun sarana *blog*. Serta dapat meningkatkan variasi motif yang terbaru melalui video tutorial di situs *youtube*.

Contoh lainnya di Perpustakaan Desa Kotaraja, seorang pengusaha kue yang sebelum memanfaatkan sarana yang ada di Perpustakaan Desa hanya mendapat 3-4 orderan kue tiap bulannya. Namun setelah aktif berkegiatan di Perpustakaan Desa melalui koleksi buku bacaan, internet, kegiatan pelibatan masyarakat yang digagas Perpustakaan Desa seperti pelatihan keterampilan, pelatihan komputer dan internet, sosialisasi kewirausahaan serta kegiatan lainnya yang diikuti secara gratis, beliau saat ini menerima 15-20 orderan kue tiap bulannya. Setelah banyak belajar dan berkegiatan di Perpustakaan Desa beliau menjadi sering membaca resep kue terbaru, memanfaatkan komputer dan internet di Perpustakaan Desa untuk mencari kreasi baru membuat atau menghias kue, belajar mempromosikan kue yang telah di buat melalui jejaring sosial serta mengetahui akses permodalan setelah adanya

sosialisasi kewirausahaan di Perpustakaan Desa. Bahkan sekarang beliau menjadi tutor untuk mengajarkan komputer serta internet kepada masyarakat lainnya yang ingin belajar hal serupa.

Keberadaan internet merupakan pelengkap dari sarana buku-buku yang ada. Pengetahuan tetap berasal dari buku-buku bacaan yang disediakan oleh Perpustakaan dan kemudian diaplikasikan pada sarana/media pendukung lainnya seperti internet sehingga ada hasil yang bermanfaat. Dampak lainnya seperti banyak Ibu-ibu Kader PKK/Posyandu yang sebelumnya belum bisa menggunakan komputer dapat belajar secara gratis di perpustakaan dan akhirnya bisa. Sehingga segala pekerjaan kader yang sebelumnya hanya tertulis dapat mulai dikerjakan menggunakan komputer. Selain itu dari buku resep yang ada di perpustakaan langsung diaplikasikan dengan mengadakan lomba memasak ataupun berinisiatif membuka usaha mandiri.

### Kesimpulan

Perpustakaan memiliki dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat serta keterampilan akan komputer/internet terutama bidang teknologi informasi (TI) serta peningkatan pendapatan masyarakat. Perpustakaan desa sebagai lembaga pendidikan sepanjang hayat (*life long learning*) diharapkan berinisiatif melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan sarana perpustakaan desa secara gratis melalui koleksi-koleksi bukunya dan sarana komputer yang dimiliki perpustakaan. Penerapan kegiatan pelibatan masyarakat secara berkelanjutan diharapkan menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa perpustakaan desa menjadi bagian kehidupannya yang tak terpisahkan serta dapat menjadi sarana meningkatkan pendapatan masyarakat.

---

### Daftar Pustaka

Hermawan S, Rachman, (2006). *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.  
Sulistyo-Basuki, (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sutarno NS, (2008). *Membina Perpustakaan Desa*. Jakarta: Sagung Seto.  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.